

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2011

PERBUP PEMALANG NO. 48 BD. 2011/ NO. 48

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif, perlu menetapkan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres NO. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2011; Perbup Kabupaten Pemalang No. 85 Tahun 2008; Perbup Kabupaten Pemalang No. 47 Tahun 2011;

 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Kegiatan Dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah, Pejabat Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Dpa/Dppa/Dpal-Skpd,Dpa/Dppa-Ppkd Dan Anggaran Kas, Pergeseran Anggaran Daerah, Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pada Ppkd, Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pada Skpd, Pengelola Pelaksanaan Apbd Pada Skpd, Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Pada

Ppkd, Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Pada Skpd, Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pada Dppkad Selaku Skpkd, Penetapan Besaran Uang Persediaan Skpd, Penetapan KPA/PPK/PPTK/PPKom-SKPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Ketentuan Lain Lain.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Desember 2011
 - Terdiri atas 271 Halaman Beserta Lampiran.